

**EFEKTIVITAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
PENEGAKAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

Oleh
Yudha Ilham Pratama
06111005045
Pendidikan Pancasila dan Kewaganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018**

**EFEKTIVITAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

Oleh

Yudha Ilham Pratama

NIM: 06111005045

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan :

Pembimbing 1

Drs. Alfiandra, M.Si

NIP. 196702051992031004

Pembimbing 2

Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan IPS

Ketua Program Studi

Dr. Farida. M.Si

NIP. 196009271987032002

Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121001

**EFEKTIVITAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM**

Oleh

Yudha Ilham Pratama

NIM: 06111005045

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juli 2018

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Alfiandra, M.Si



2. Sekretaris: Kurnisar, S.Pd., M.H



3. Anggota : Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D



4. Anggota : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si



5. Anggota : Sulkipani, S.Pd., M.Pd



**Indralaya, Agustus 2018
Mengetahui,
Ketua Program Studi**



**Kurnisar, S.Pd., M.H
NIP. 19681221199412001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudha Ilham Pratama

NIM : 06111005045

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “efektivitas tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Muara Enim” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan mentri pendidikan nasional republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Yudha Ilham Pratama
061110050145

PRAKATA

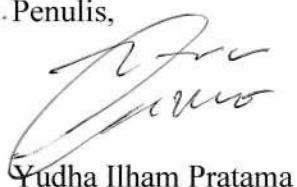
Skripsi dengan judul “efektivitas tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Muara Enim” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. Alfiandra, M.Si dan Kurnisar, S.Pd., M.H. sebagai pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., sebagai Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kurnisar, S.Pd., M.H., Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga di tujuhan kepada Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D., Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si dan Sulkipani, S.Pd., M.Pd. anggota penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih kepada staf dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, yang telah memberikan kemudahan selama pelaksanaan penelitian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga sekripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Indralaya, Juli 2018

Penulis,



Yudha Ilham Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Secara Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Secara Praktis	5
1.4.2.1 Bagi Masyarakat	5
1.4.2.2 Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	5
1.4.2.3 Bagi Peneliti	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 6
2.1 Efektivitas Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja...8	8
2.1.1 Pengertian Efektivitas	9
2.1.2 Indikator Efektivitas	7
2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	7
2.1.4 Pengukuran Efektivitas.....	8
2.1.5 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja.....	10

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.....	10
2.1.7 Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.....	12
2.1.8 Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi PamonPraja.....	13
2.2 Ketertiban Umum Dan Ketentrman Masyarakat.....	14
2.2.1 Pengertian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	14
2.2.2 Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Muara Enin.....	15
2.3 Kerangka Berpikir	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1 Variabel Dan Definisi Operasional Variabel.....	20
3.1.1 Variabel Penelitian	20
3.1.2 Definisi Operasional Variable	20
3.2 Situasi Sosial Dan Informna	22
3.2.1 Situasi Sosial	22
3.3.2 Informan Penelitian	23
3.3 Teknik Pengumpulan Data	24
3.4.1 Teknik Dokumentasi	24
3.4.2 Teknik Wawancara	25
3.4.3 Teknik Observasi	26
3.4 Teknik Analisis Data	27
3.4.1 Reduksi Data	27
3.4.2 Penyajian Data	28
3.4.3 Penarikan Kesimpulan	28
3.5 Uji Keabsahan Data Kualitatif	29
3.5.1 Uji Credibility	29
3.5.2 Uji Tranferability	30
3.5.3 Uji Dependability	30
3.5.4 Uji Confirmability	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	33
4.1.2 Deskripsi Data Dokumentasi	33
4.1.2.1 Gambaran Umum Kabupaten Muara Enim	33
4.1.2.2 Satuan Polisi Pamong Praja	34
4.1.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Satpol PP	36
4.1.3 Deskripsi Data Hasil Wawancara	37
4.1.3.1 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Pertama dan Kedua	38
4.1.3.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara Informan Pendukung	45
4.1.4 Deskripsi Data Hasil Observasi	48
4.1.5. Analisis Data Hasil Penelitian.....	49
4.1.5.1 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Terkait Dalam Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	49
4.1.5.2 Pencapaian Target Yang Telah Ditentukan Dalam Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	52
4.2 Pembahasan	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	59
5.2.1 Bagi Masyarakat	60
5.2.2 Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	60
5.2.3 Bagi Peneliti	60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	21
Tabel 3.2 Informan Penelitian	24
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	33
Tabel 4.2 Sarana Dan Prasarana.....	34
Tabel 4.3 Data Hasil Wawancara dengan Informan Pertama Dan Kedua	39
Tabel 4.4 Data Hasil Wawancara dengan informan pendukung ke-3.....	46
Tabel 4.5 Data Hasil Wawancara Dengan Informan Pendukung ke-4 dan 5...	47
Tabel 4.6 Hasil Pengumpulan Data Pelaksana.....	51
Tabel 4.7 Hasil Pengumpulan Data Pencapaian	55
Tabel 4.8 Penilaian.....	57

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir	18
Bagan 2.2 Alur Penelitian	19
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Studi Pendahuluan
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian dari FKIP Unsri
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Hadir Mahasiswa Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Daftar Hadir Dosen Seminar Proposal
- Lampiran 8 : Daftar Hadir Dosen Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 9 : Daftar Hadir Mahasiswa Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 10 : Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
- Lampiran 11 : Instrumen Penelitian
- Lampiran 12 : Rencana Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 13 : Foto-Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 14 : Kartu Bimbingan Skripsi

**EFFECTIVENESS OF TASKS AND BASIC FUNCTIONS
PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN THE ENFORCEMENT
OF PUBLIC ORDER AND PUBLIC PEACE IN MUARA
ENIM REGENCY**

By:

Yudha Ilham Pratama

06111005045

**Advisors: (1) Drs. Alfiandra, M.Si
(2) Kurnisar, S.Pd., M. H.
Civic Education Study Program**

ABSTRAC

This study aims to determine the effectiveness of tasks and basic functions pamong praja police unit in the enforcement of public order and public peace in Muara Enim regency. This research uses social situation method with qualitative approach. Data collection techniques used are documentation, interviews, and observation Based on data analysis that has been done before, it can be concluded that Muara Enim District pamong praja police unit in enforcement of public order and public peace has been implemented fairly well based on its implementation and achievement on target based on the concept of productivity by accentuate persuasive and preventive attitudes by making regular appeals and conducting early prevention patrols, also from the percentage of observations of implementation and achievement by pamong praja police unit of 110% seen from the assessment of effectiveness performance included in the effectiveness category.

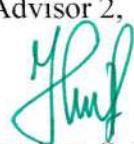
Keywords: Pamong Praja Police Unit, Effectiveness, Public Order and Public Peace

Advisor 1,



Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004

Advisor 2,



Kurnisar, S. Pd., M. H.
NIP. 197603052002121001

Knowing,
Head of Civic Education Study Program



Kurnisar, S. Pd., M. H.
NIP. 197603052002121001

**EFFECTIVENESS OF TASKS AND BASIC FUNCTIONS
PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN THE ENFORCEMENT
OF PUBLIC ORDER AND PUBLIC PEACE IN MUARA
ENIM REGENCY**

By:
Yudha Ilham Pratama
06111005045
Advisors: (1) Drs. Alfiandra, M.Si
(2) Kurnisar, S.Pd., M. H.
Civic Education Study Program

ABSTRAC

This study aims to determine the effectiveness of tasks and basic functions pamong praja police unit in the enforcement of public order and public peace in Muara Enim regency. This research uses social situation method with qualitative approach. Data collection techniques used are documentation, interviews, and observation Based on data analysis that has been done before, it can be concluded that Muara Enim District pamong praja police unit in enforcement of public order and public peace has been implemented fairly well based on its implementation and achievement on target based on the concept of productivity by accentuate persuasive and preventive attitudes by making regular appeals and conducting early prevention patrols, also from the percentage of observations of implementation and achievement by pamong praja police unit of 110% seen from the assessment of effectiveness performance included in the effectiveness category.

Keywords: Pamong Praja Police Unit, Effectiveness, Public Order and Public Peace

Advisor 1,

Drs. Alfiandra, M.Si
NIP. 196702051992031004

Advisor 2,

Kurnisar, S. Pd., M. H.
NIP. 197603052002121001

Knowing,
Head of Civic Education Study Program


Kurnisar, S. Pd., M. H.
NIP. 197603052002121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat dan pembangunan yang merata dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mensukseskan pembangunan yang sedang berjalan salah satu langkah pentingnya yaitu menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, untuk itu pemerintah Kabupaten Muara Enim meresponnya dengan mengeluarkan regulasi atau kebijakan berupa peraturan daerah yang mampu menjadi aturan yang sah dalam mengatasi permasalahan keteriban umum dan ketentraman masyarakat, serta dibentuk lembaga atau aparatur yang dapat membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam lingkup Kabupaten Muara Enim didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 (Sekda Kabupaten Muara Enim, 2013: 15) Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim yang selaras dan juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Pasal 1 angka 8 (Setneg Republik Indonesia, 2010: 3) tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa “satuan polisi pamong praja selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Sejalan dengan itu, Satpol PP juga dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong (Setneg Republik Indonesia, 2010: 4) dinyatakan bahwa ”Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Adapun yang menjadi fungsi dan tugas Satuan Polisi

Pamong Praja yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 5 (Setneg Republik Indonesia, 2010: 4) yaitu:

- a.) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b.) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c.) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d.) Pelaksanaan kebijakan perlindungan umum;
- e.) Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan aparat kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah dan aparatur lainnya ;dan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f.) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi optimal Satpol PP memiliki wewenang demi menunjang penegakan di lapangan adapun wewenang Satpol PP yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6 (Setneg Republik Indonesia, 2010: 5) yaitu;

- a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dengan memiliki tugas dan fungsi ditambah juga wewenang yang jelas sehingga Satpol PP memiliki landasan yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan dalam lingkup memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Muara Enim khususnya di

Kota Muara Enim. Untuk itu keberhasilan dalam menerapkan tugas tersebut perlu didukung dan ditunjang dengan prasarana, sumberdaya dan organisasi yang memadai demi hasil dan tujuan yang akan dicapai secara maksimal .

Proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh Satpol PP begitu kompleks dalam penerapannya banyak hal yang mempengaruhi hasil tersebut, menurut Agustino (2012: 139) “keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian akhir(*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih” oleh karena itu untuk melihat efektivitas Satpol PP dalam melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati sesuai dengan dikemukakan oleh Sumaryadi (2005: 112)

“efektivitas implementasi kebijakan efektif apabila terjadinya efektivitas pada tingkat procedural dan juga efektivitas pada tingkat tujuan dan hasil yang hendak dicapai, oleh karena hal itu selain aspek *procedural*, yang tak kalah pentingnya adalah aspek tujuan, dengan demikian sesuai dengan aspek procedural dan tujuan yang dinginkan serta menghasilkan manfaat nyata kepada masyarakat”.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pada organisasi umumnya diukur dengan konsep efektivitas, menurut Tangkilisan (2005: 143) efektivitas organisasi tercakup “kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) suatu organisasi, produktivitas organisasi, dan tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara anggota organisasi.”. Tetapi yang terjadi di lapangan setelah dilakukan observasi dan studi pendahuluan oleh peneliti, banyak permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi hal ini diutarakan oleh Kepala seksi kerjasama bidang kententruman dan ketertiban umum bahwasanya Satpol PP Kabupaten Muara Enim menghadapi berbagai kendala dalam seperti kurangnya kualitas anggota dalam pengalaman dan pemahaman di lapangan mengenai tugas dan fungsi Satpol PP sehingga mengakibatkan tindakan anarkis dan arogan yang dilakukan anggota, hal ini juga didukung oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim yang mengemukakan bahwa (<https://sumateradeadline.co.id/2016/09/09/satpolPP/nurani. 2016>) :

“dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari Satpol PP Kabupaten Muara Enim menghadapi berbagai kendala bersifat internal maupun

eksternal, kendala internal meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat, serta instumen hukum sebagai landasan bekerja, sementara kendala eksternal yang sangat menonjol adalah tingginya perlawanan masyarakat.”

Berkaitan dengan fenomena di atas wajar keyataan di lapangan timbul bermacam-macam permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Muara Enim dikarenakan anggota di lapangan terkesan hanya menggunakan pendekatan aksi yang bedampak buruk, sehingga timbul kekecewaan dan anggapan buruk dalam efektivitas tugas dan fungsi Satpol PP di masyarakat. Misalnya keriuhan penertiban antara anggota Satpol PP dengan pedagang kaki lima di pasar Inpres Muara Enim dan pengrusakan aset-aset perusahaan dermaga PT. Batubara Mandiri di kecamatan Gunung Megang serta pula kasus pungutan liar yang dilakukan oknum Satpol PP.

Dari pemaparan dan penjelasan di atas menimbulkan dugaan bahwa memang terdapat adanya masalah dan kendala di dalam menjalankan efektivitas tugas dan fungsi yang dialami oleh Satpol PP Kabupaten Muara Enim untuk itu peneliti ingin mengetahui dan menelaah lebih lanjut sehingga peneliti tertarik mengangkat tema ini menjadi karya tulis ilmiah yang berjudul “Efektivitas Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja Dalam Menegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang Efektivitas Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Satpol PP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan atau referensi dalam mengambil keputusan sesuai fungsinya sesuai dengan koridor yang ada untuk menciptakan kawasan yang tertib dan tentram di Kabupaten Muara Enim.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pembelajaran, pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai Efektivitas Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemililih Langsung*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Anwar, Oos M. 2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Alfabeta.
- Hardiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Selemba Humanika.
- Hikmat, Harry. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Koentjaraningrat. (2009). Kebudayaan, Mentalis dan pembangunan. Jakarta : Gramedia.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso. (1995). Pembinaan dalam organisasi. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Didik G. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama.
- Sumaryadi, I. Wayan. (2005). *Perncaaan Pembangunan Daerah dan Pemerdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Suriadi, Agus. (2005). *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat (Diklat)*. Medan : Fisip USU.
- Suwondo, C. (2008). *Outsourcing Implementasi di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Totok, Mardikanto., & Poerwoko, Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*

Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widjaja, HAW. (2012). *Otonomi Desa Merupakan Yang Asli, Bulat Dan Utuh.*
Jakarta : PT Raja Grafindo Persa.